**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Organisasi merupakan suatu wadah kegiatan sekelompok orang yang bekerja sama dalam dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap organisasi baik pemerintahan maupun swasta, dalam kegiatan operasionalnya senantiasa membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu melaksanakan tugasnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Organisasi dapat terbentuk karena adanya penyatuan visi misi serta tujuan yang sama dan didalam prakteknya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Unsur utama yang memegang peranan penting untuk mencapai tujuan organisasi, terutama organisasi pemerintahan, dan pembangunan dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat, sehingga keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat ditentukan oleh manusia yang menjadi anggota organisasi tersebut.

Pemerintah Kota Bandung dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan dan proses pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat membentuk organisasi perangkat daerah sebagai instansi pelaksana teknis sebagaimana ditetapkan dengan peraturan Wali Kota Bandung nomor 1406 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bagsa dan Politik Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung membentuk badan yang mempunyai tugas dan fugsi melaksanakan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat guna mencegah konflik-konflik yang terjadi di masyarakat demi menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kota Bandung. Maka di bentuklah Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung yang sebelum sekarang berganti nama dulu bernama Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM).

Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah BKBPM Kota Bandung juga telah mempunyai Tugas Pokok, Fungsi, serta Uraian Tugas berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No. 295 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung (BKBPM).

Peran dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung ini mempunyai 3 fungsi bidang dalam menjalankan tupoksinya yaitu:

1. Bidang Ideologi dan Waawasan Kebangsaan
2. Bidang Politik Dalam Negeri
3. Bidang Kewaspadaan

Terbentuknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan mengaktualisasikan nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada masyarakat kota Bandung. Bertujuan untuk terciptanya keadaan masyarakat yang kondusif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dalam keanekaragaman ras, suku, budaya dan agama dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keberhasilan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional antara lain ditentukan oleh kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengendalian mempunyai peran yang sangat penting dalam mempengaruhi pegawai agar dapat bekerja penuh disiplin yaitu dengan mentaatai segala peraturan yang berlaku, demikian pula halnya dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung harus berusaha meningkatkan kemampuan, kecakapan, serta keterampilan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu melalui pengendalian.

Kemampuan pegawai dalam melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan secara disiplin relative masih rendah, sehingga alat ukur pengendalian salah satunya *finger print* belum berlangsung efektif dan efisien. Berdasarkan pada hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian. Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, dimana disiplin pegawainya belum optimal, sehingga pelaksanaan tugas-tugasnya belum efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penjajagan yang peneliti lakukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, masih terlihat bahwa disiplin kerja pegawai masih rendah, hal ini terlihat dari indikator sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu yang masih rendah, terlihat dari :

Masih ditemuinya pegawai yang melanggar aturan jam kerja, misalnya ketidak tepatannya wakru jam masuk kantor dan jam pulang kantor. Berdasarkan aturan yang berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk pada pukul 07.30 dan pulang pada pukul 16.00 wib.

1. Memahami prosedur kerja, belum optimal terlihat dari :

Masih ditemuinnya pegawai yang melanggar aturan yang sudah dibuat seperti halnya ada aturan larangan merokok di dalam ruangan kerja namun salah seorang pegawai merokok di dalam ruangan kerja dan bersantai-santai dalam pekerjaannya.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan di atas , peneliti menduga bahwa pengendalian belum dijalankan sepenuhnya atas alat ukur sebagai berikut :

1. Sanksi yang belum ditetapkan, terlihat dari :

Tingkat kesadaran pegawai akan sanksi yang di berikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung masih belum memberikan efek jera terhadap pegawainya.

1. Pembagian tugas dan wewenang yang masih rendah.

Terlihat dari pembagian tugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung masih belum berfungsi sebagaimana mestinya. Terutama kurang selektif memilih pegawai yang tepat dan sesuai dengan kemampuan .

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas yang didukung oleh teori-teori yang ada serta dilengkapi dengan data yang terjadi pada kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan mencari alternative pemecahannya yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul : **“ Pengaruh Pengendalian Terhadap Disiplin Kerja Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung”**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan maslaha yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pengendalian terhadap disiplin kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengahambatan pengendalian terhadap disiplin kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung?
3. Usaha apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pengaruh pengendalian terhadap disiplin kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan mendapat data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik Universitas Pasundan Bandung. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis besarnya pengaruh pengendalian terhadap disiplin kerja pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghambatan pengendalian terhadap disiplin kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung
3. Menganalisis usaha apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pengendalian terhadap disiplin kerja pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung

**1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama pekuliahan di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung serta dapat memberikan sembangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik umumnya, mengenai pengendalian dan disiplin kerja.

1. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah khususnya yang berkaitan dengan pengaruh pengendalian terhadap disiplin kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.